

Analisis Penerapan Manajemen Resiko dalam Mewujudkan Visi Strategis di Kabupaten Bandung Barat

¹Mia Rosmiati, ²Fahrizal Maizi

¹² Politeknik Negeri Bandung

e-mail : ¹ mia.rosmiati@polban.ac.id, ² fahrizalmaizi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih belum efektif jika dibandingkan dengan Pemerintah Daerah lain yang sudah menetapkan Peraturan Daerah mengenai Manajemen Risiko. Padahal Manajemen Risiko mampu membantu pemerintah dalam pencapaian tujuan dan mewujudkan prinsip visi strategis dalam Good Governance serta sudah ada peraturan untuk menerapkannya, yaitu PP No 60 tahun 2008.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum efektif karena beberapa faktor seperti pemahaman yang kurang, kesadaran akan pentingnya Manajemen Risiko yang kurang, dan sumber daya yang tidak memadai. Pedoman penerapan Manajemen Risiko sudah ada, namun kurang disosialisasikan. Saran yang dapat ditawarkan adalah sosialisasi harus dilakukan secara masif dan menyeluruh untuk menyatukan pemahaman seluruh Perangkat Daerah mengenai Manajemen Risiko.

Kata Kunci : Manajemen Risiko; Visi Strategis; *Good Governance*; Pemerintah.

Analysis of The Application of Risk Management in Realizing The Strategic Vision at Kabupaten Bandung Barat

Abstract

This study analyses how the implementation of Risk Management in the Kabupaten Bandung Barat Government to realize the strategic vision of Good Governance. The method used in this study is a qualitative approach with a type of descriptive analysis research. The result to from this study is that the implementation of Risk Management in the Kabupaten Bandung Barat Government has not been effective due to several factors such as lack of understanding, lack of awareness of the importance of Risk Management, and inadequate resource. The guidelines for implementing Risk Management is already exist, but it is not well socialized. Suggestion that can be offered are socialization must be carried out massively and thoroughly to unify the understanding of all Regional Instruments regarding Risk Management.

Keywords: Risk Management; Strategic Vision; *Good Governance*; Government.

A. PENDAHULUAN

Tiga tahun sebelum pemerintah Indonesia merasa perlu untuk menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan terutama dalam hal yang berkaitan dengan sistem keuangan negara yang kemudian mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ternyata Indonesia sudah mengenal konsep manajemen resiko. Saat itu Bank Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

di Indonesia untuk menerapkan prinsip Basel yaitu standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision dimana BCBS ini adalah komite yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan (Stabilitas.co.id, 2016). Prinsip ini dibuat untuk mengantisipasi munculnya resiko di bidang perbankan. Untuk itulah maka kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tersebut. Sementara itu lembaga negara yang pertama kali menerapkan manajemen resiko adalah Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008.

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan pemerintahan saat ini sangat didukung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini disebabkan karena meskipun organisasi pemerintahan tidak mencari laba, bukan berarti risiko itu tidak ada. Jika risiko di lingkungan pemerintahan tidak dikelola dengan baik maka akan dapat mengganggu tercapainya tujuan organisasi. Menurut Prof. Jamal Wiwoho, penerapan Manajemen Risiko di lingkungan pemerintahan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Mengurangi kejutan yang muncul;
2. Meningkatnya kesempatan untuk memanfaatkan peluang;
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja;
4. Meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
5. Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
6. Meningkatnya reputasi organisasi;
7. Meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
8. Meningkatnya akuntabilitas organisasi.

Penerapan Manajemen Risiko yang baik adalah salah satu upaya untuk dapat mewujudkan tercapainya Good Governance

melalui salah satu prinsipnya yaitu visi strategis. Visi strategis inilah yang akan menguraikan tahapan demi tahapan dari penerapan manajemen resiko di instansi pemerintah sehingga akan meminimalisir timbulnya berbagai permasalahan terutama dalam bidang keuangan seperti terjadinya kebocoran dan kecurangan dalam pengelolaan anggaran.

Beberapa research terdahulu selalu merujuk kepada pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk mengatasi beberapa peristiwa kebocoran dan kecurangan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akan tetapi penulis lebih tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai manajemen resiko sebagai bentuk inovasi dari SPIP itu sendiri.

Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan salah satu pemerintahan daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tahun 2007 dengan dasar hukum pendirian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 yang berupaya untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bentuk inovasi dari SPIP, dengan baik untuk mewujudkan Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul, dan Religius) serta dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih (akurmedia.com). Dari berita tersebut kita melihat adanya itikad baik yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat untuk menerapkan manajemen risiko di lingkungan pemerintahannya. Tentunya hal ini harus didukung oleh semua pihak di Kabupaten Bandung Barat, termasuk seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan terjun langsung dalam menerapkan Manajemen Risiko tersebut.

B. PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif akan mampu memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Hal ini disebabkan karena dalam proses identifikasi risiko, Pemerintah membutuhkan pendapat para ahli yang bisa memprediksi dengan akurat kemungkinan di masa depan berdasarkan bidang ilmu yang

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

dimiliki. Dengan begitu maka penerapan Manajemen Risiko mampu memberi gambaran tentang posisi organisasi dalam waktu yang akan datang sehingga mampu menentukan visi strategisnya seperti apa.

Visi strategis sangat penting dalam menentukan program dan kegiatan pemerintah sehingga dibutuhkan visi strategis yang baru untuk menentukan tujuan dari terlaksananya program dan kegiatan pemerintah. Dalam menentukan visi strategis dibutuhkan prediksi akurat terhadap kemungkinan kemunculan risiko apa saja di masa yang akan datang. Sehingga oleh karena itu, Manajemen Risiko sangat berperan terhadap kualitas visi strategis organisasi.

Dalam penerapan Manajemen Risiko, proses yang akan mendukung pencapaian prinsip visi strategis adalah penetapan konteks. Penetapan konteks ini dilakukan dalam rangka mengetahui karakter dan ruang lingkup serta cakupan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini penting untuk mengetahui batasan-batasan risiko yang berdampak langsung kepada Kabupaten Bandung Barat dan mempengaruhi proses pencapaian tujuan. Penetapan konteks ini merupakan langkah yang paling awal untuk dilakukan oleh Komite Pelaksana untuk tingkat Kabupaten Bandung Barat dan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Jadwal pelaksanaannya berdasarkan pedoman tersebut adalah dilaksanakan pada awal periode, dalam hal ini satu periode adalah satu

tahun. Untuk proses penetapan konteks pada tingkat Kabupaten Bandung Barat harus diselesaikan dan dilaporkan oleh Komite Pelaksana kepada Komite Eksekutif pada minggu pertama lalu akan dibahas dan ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling lambat pada minggu kedua di awal periode. Kemudian untuk proses penetapan konteks pada tingkat Perangkat Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang kemudian disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan ditembuskan kepada

Compliance Office for Risk Management paling lambat pada minggu keempat di awal periode. Kemudian konteks tersebut dipantau secara berkala bersamaan dengan pelaksanaan penilaian risiko dan apabila terjadi perubahan, maka Komite Eksekutif untuk tingkat Kabupaten Bandung Barat dan Kepala Perangkat Daerah untuk tingkat Perangkat Daerah berhak untuk melakukan perubahan konteks Manajemen Risiko.

Kemudian adapun langkah kerja dalam penetapan konteks Manajemen Risiko Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Tujuan

Tentunya untuk menetapkan konteks Manajemen Risiko harus diketahui terlebih dahulu tentang tujuan organisasi. Hal ini harus dilakukan karena salah satu tujuan dari penerapan Manajemen Risiko adalah untuk mempermudah organisasi dalam pencapaian tujuannya. Maka oleh karena itu menentukan tujuan adalah hal yang paling pertama dilakukan dalam penetapan konteks baik pada tingkat Kabupaten Bandung Barat maupun pada tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Menentukan Parameter Penerapan Manajemen Risiko

Parameter yang perlu ditentukan dalam penetapan konteks di antaranya adalah ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko, periode penerapan Manajemen Risiko, dan Output yang diharapkan dalam penerapan Manajemen Risiko.

3. Menentukan Struktur Manajemen Risiko

Untuk menjamin kelancaran dan efektivitas dalam penerapan Manajemen Risiko maka diperlukan struktur Manajemen Risiko. Struktur Manajemen Risiko sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa untuk tingkat Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Komite Eksekutif dan Komite Pelaksana, sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah terdiri dari Kepala Perangkat Daerah beserta bawahannya yang satu tingkat di bawah Kepala Daerah.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

4. Menentukan Para Stakeholders yang Terkait

Para stakeholders baik internal maupun eksternal perlu ditentukan dengan tepat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses Manajemen Risiko baik pada tingkat Kabupaten Bandung Barat maupun pada tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

5. Menetapkan Kriteria Risiko

Pada subbab Kebijakan Manajemen Risiko di Pemerintah kabupaten Bandung Barat sudah dijelaskan bagaimana kriteria risiko Kabupaten Bandung Barat. Hal ini penting untuk menentukan level kemungkinan dan level dampak risiko yang berpotensi muncul di masa yang akan datang.

6. Menentukan Matriks Analisis Risiko

Matriks analisis risiko perlu ditentukan untuk mengetahui level risiko serta untuk mengetahui risiko mana saja yang menjadi prioritas dan perlu ditindaklanjuti dengan cepat. Matriks analisis risiko sudah diatur dan ditetapkan dalam pedoman penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah kabupaten Bandung Barat.

7. Menetapkan Selera Risiko

Selera risiko merupakan ketetapan tentang batasan level risiko yang diterima. Hal ini perlu ditetapkan dalam rangka mengetahui risiko mana saja yang tidak perlu dimitigasi dan mana saja yang perlu dimitigasi.

8. Mendokumentasikan hasil penetapan konteks Manajemen Risiko ke dalam suatu piagam Manajemen Risiko pada tingkat Kabupaten Bandung Barat dan pada tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Penetapan konteks akan mempengaruhi bagaimana proses selanjutnya, termasuk pada saat mitigasi risikonya. Proses mitigasi risiko juga merupakan bagian dari visi strategis yang proses keputusannya harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan banyak faktor. Mitigasi risiko dilakukan setelah melakukan penilaian risiko, yaitu penerapan proses Manajemen Risiko mulai dari identifikasi risiko hingga evaluasi risiko, maka

hal selanjutnya yang dilakukan adalah bagaimana memperlakukan risiko tersebut

atau yang sering disebut dengan mitigasi risiko. Mitigasi risiko dilakukan sebelum melakukan pelaporan terhadap penerapan Manajemen Risiko. Mitigasi risiko dilakukan dalam upaya untuk menurunkan level risiko hingga berada pada area aman atau pada area penerimaan risiko sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam kriteria selera risiko Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Untuk pelaksanaan mitigasi risiko baik pada tingkat Kabupaten Bandung Barat maupun pada tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dilakukan sepanjang periode. Penanggung jawab pelaksanaannya adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan mitigasi risiko sesuai dengan batas kewenangannya. Dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab melakukan mitigasi risiko adalah Person in Charge (PIC). PIC melakukan proses mitigasi risiko baik pada tingkat Kabupaten Bandung Barat maupun pada tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan batas kendali dan kewenangannya.

Dalam melakukan perencanaan mitigasi risiko baik Komite Pelaksana maupun Kepala Perangkat Daerah harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Jika mitigasi risiko bersifat teknis maka dapat diturunkan kepada unit di bawahnya yang terkait. Berikut adalah cakupan langkah kerja mitigasi risiko baik pada tingkat Kabupaten Bandung Barat maupun pada tingkat Perangkat Daerah.

1. Menentukan opsi mitigasi risiko yang akan dijalankan.

Penentuan opsi mitigasi risiko dilakukan oleh Komite Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kondisi risiko, sumber daya organisasi, dan kemungkinan bagi pelaksanaannya. Beberapa opsi yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk menangani risiko adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko;
- b. Menurunkan dampak suatu risiko;
- c. Membagi atau mengalihkan risiko;
- d. Menerima risiko; dan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

- e. Menghindari risiko.
2. Menyusun rencana mitigasi risiko.
 Komite Pelaksana dan Kepala Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana beberapa tindakan/kegiatan untuk menangani risiko. Dalam menyusun rencana mitigasi risiko harus memuat:
 - a. Perincian kegiatan secara jelas dan spesifik;
 - b. Ukuran dan target dari setiap kegiatan mitigasi risiko;
 - c. Jadwal pelaksanaan dari setiap kegiatan mitigasi risiko; dan
 - d. Personil yang bertanggung jawab dari setiap kegiatan mitigasi risiko.
 3. Menetapkan target penurunan level risiko.
 Pada tingkat Kabupaten Bandung Barat penetapan target penurunan level risiko dilakukan oleh Komite Eksekutif dan pada tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah. Dalam penetapan target penurunan level risiko harus dilakukan dengan cermat dan teliti serta memperhatikan level kemungkinan serta level dampak risiko. Selain itu juga harus memperhatikan kekuatan rencana mitigasi risiko untuk penurunan level risiko. Target penurunan level risiko daka dituangkan pada level risiko residu harapan
 4. Menjalankan setiap rencana mitigasi risiko.
 Penanggung jawab kegiatan mitigasi risiko, baik secara bersama-sama maupun mandiri, harus menjalankan setiap kegiatan atau tindakan mitigasi risiko sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disusun. Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait harus dibangun serta pemantauan atas pelaksanaan setiap mitigasi risiko baik pada tingkat Kabupaten Bandung Barat maupun pada tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
 5. Mendokumentasikan rencana mitigasi risiko yang akan dijalankan serta proses mitigasinya yang sudah dijalankan.
 Proses mitigasi risiko ini dilakukan harus secara benar, terutama pada saat penentuan

pilihan dalam memitigasinya. Proses mitigasi risiko ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap prinsip visi strategis, dengan kata lain penentuan opsi mitigasi risiko adalah penentuan visi strategis. Penetapan konteks dan mitigasi risiko memiliki hubungan erat dalam mewujudkan prinsip visi strategis. Penetapan konteks akan menentukan kekuatan dan kelemahan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sehingga dalam penentuan visi strategisnya dilakukan secara tepat dan berdasarkan konteks yang tepat. Visi strategis adalah kemampuan pemerintah dalam menentukan rencana-rencana strategisnya, termasuk objektif-objektif yang ingin dicapai. Oleh karena itu dalam penentuan visi strategis harus melihat konteks secara keseluruhan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang menjadi bagian dari penetapan visi strategis berdasarkan konteks yang sudah ditetapkan sebelumnya adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan visi strategis yang menjadi rencana pemerintah dalam memitigasi risiko baik dalam jangka waktu yang lama maupun jangka waktu yang panjang. Lebih jauh dari itu, penetapan konteks juga akan menjadi dasar dalam menyusun rencana strategis (renstra) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai tujuan-tujuannya. Maka oleh karena itu, hubungan antara penetapan konteks, mitigasi risiko, dan visi strategis sangat erat dan tidak terpisahkan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap penerapan Manajemen Risiko sebagai bentuk inovasi dari system pengendalian internal dalam mewujudkan visi strategis di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dimana pemerintah perlu melakukan perencanaan yang strategis untuk ke depannya demi menjaga ketahanan organisasi dalam tantangan global. Dalam proses Manajemen Risiko, yang mendukung tercapainya prinsip ini adalah penetapan konteks serta mitigasi risiko. Penetapan konteks membantu Pemerintah Kabupaten

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Bandung Barat menentukan tujuan-tujuan yang memiliki peluang besar untuk dicapai di masa depan. Lalu kemudian mitigasi risiko juga dapat menjadi visi strategis yang bertujuan untuk mengurangi dampak risiko yang ditimbulkan. Namun penerapan dua proses ini masih belum berjalan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sehingga prinsip visi strategis masih belum dapat dicapai dengan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang baru, akan tetapi usahanya dalam menerapkan Manajemen Risiko di lingkungan pemerintahannya perlu diapresiasi. Kepala Daerah saat ini memiliki komitmen untuk menerapkan Manajemen Risiko demi mewujudkan pemerintahan baik sesuai dengan prinsip visi strategis dalam Good Governance. Namun dalam penerapannya, Manajemen Risiko belum berjalan secara efektif oleh karena itu ada beberapa saran yang dapat penulis tawarkan, di antaranya adalah:

1. Melakukan sosialisasi lebih masif lagi, bila perlu dilakukan secara berkala dan terjadwal untuk menyatukan persepsi seluruh Perangkat Daerah mengenai Manajemen Risiko.
2. Melakukan pelatihan teknis mengenai bagaimana penerapan Manajemen Risiko agar berjalan efektif dan dapat memberikan umpan balik yang baik bagi organisasi.
3. Melakukan perencanaan anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan penerapan Manajemen Risiko kepada seluruh Perangkat Daerah paling tidak pada tahun anggaran 2020. Harapannya tahun 2020 dilakukan pelatihan-pelatihan secara matang agar Perangkat Daerah dapat melakukan proses Manajemen Risiko secara efektif sehingga pada tahun 2021 Manajemen Risiko sudah efektif diterapkan dan dapat menjadi percontohan bagi Pemerintah Daerah yang lain.

REFERENSI

- Adelia, R. (2015). Pengaruh Auditor Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance). Skripsi.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018, 11 09). BPKP. Diambil kembali dari Implementasi Manajemen Risiko Inspektorat BPKP: www.bpkp.go.id
- Badan Standardisasi Nasional. (2016). SNI valuasi. Majalah.
- Badan Standardisasi Nasional. (2018, Mei 11). BSN. Diambil kembali dari Grand Desain Manajemen Risiko di Lingkungan BSN: www.bsn.go.id
- Dailiati, S., Hernimawati, & Sudaryanto. (2018). Principles of Good Governance in the Department of Population and Civil Records Pekanbaru. Paper Journal.
- Darmawiguna, I. Y., & Mimba, N. S. (2017). Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance dan Implikasinya pada Kinerja Pemerintah. Skripsi.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2014). The New Public Service: Serving Rather than Steering. *Public Administration Review*.
- Dionne, G. (2013). Risk Management: History, Definition and Critique. Penelitian.
- Griffiths, D. (2019). Risk Based Internal Auditing - An Introduction Version 5.0. Panduan.
- Hadi, W. A., & Karningsih, P. D. (2017). Pengembangan Sistem Manajemen Risiko di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Berdasarkan ISO 31000. Skripsi.
- Hamduh, H. M. (2006). Manajemen Risiko. Jakarta.
- Hardy, K. (2010). Managing Risk in Government: An Introduction to Enterprise Risk Management. Washington: IBM Center.
- Hidayah, R., Sukirman, Suryadari, D., & Rahayu, R. (2018). Peran Auditor

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

- Internal dalam Implementasi Manajemen Risiko pada Perguruan Tinggi. Skripsi.
- Hood, C., & Rothstein, H. (2000). Business Risk Management in Government: Pitfalls and Possibilities. Houghton Steet: the Center of Analysis of Risk and Regulation.
- Hutter, B. M., & Jones, C. J. (2007). From Government to Governance: External Influences on Business Risk Management. Regulation & Governance. Indonesia, Center for Risk Management Studies. (2018). Survei Nasional Manajemen Risiko 2018. Jakarta: CRMS Indonesia.
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Skripsi.
- Mnt-part-of-internal-control-or-is-it-the-other-way-around#
- Mulyawan, S. (2015). Manajemen Risiko. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pradana, Y. A., & B., R. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Governance. Jakarta: Trikonomika.
- Perundang-undangan di Indonesia. Seminar Manajemen Risiko. Jakarta: BPKP.
- Rahmat, & S., W. (2018, Oktober 25). Kab. Bandung Barat. Diambil kembali dari Media Online Akur Media.com: www.akurmedia.com
- Siena, I. (2016, Agustus 4). Merdeka, Politik. Diambil kembali dari Merdeka.com: www.merdeka.com
- Soeprapto, R. (2006). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Workshop Reformasi Birokrasi. Kendari.
- Stabilitas. (2016, Nopember 24). Manajemen Risiko. Diambil kembali dari Stabilitas: www.stabilitas.co.id
- Suharso. (2016, Desember 07). Manajemen Risiko Ala COSO: Dulu dan Nanti. Diambil kembali dari Klikharso: <https://www.klikharso.com/2016/07/manajemen-risiko-coso-dulu-dan-nanti.html>
- Wiwoho, J. (2018). Implementasi Manajemen Risiko di Kemeristekdikti. Rapat Koordinasi Nasional Forum SPI PTN IV. Batam: Irjen Kemenristekdikti.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep. 964-Inspekt/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Daerah Provinsi Jawa Barat
- Keputusan Bupati Bandung Nomor: 188.45/Kep. 509-Itda/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat